

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum dewasa ini semakin menuju ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang lebih terarah. Perubahan pola pemilihan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan adil dan bijaksana. Berjalannya reformasi pemilihan calon legislatif, presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah dilakukan secara langsung. Seiring perubahan sistem tersebut, sistem-sistem pemilihan di Indonesia tentu saja berubah mengikuti undang-undang yang berlaku. Proses pemungutan suara ini dirasakan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ada yang perlu diperbaiki demi terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses dari konsep sistem demokrasi yang dipakai di berbagai negara belahan dunia yang menganut paham Liberalisme, dimana dalam memilih kepala negara dan wakil rakyatnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu definisi pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu tahapan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dan turut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat di pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Di Indonesia sendiri sekurangnya sudah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih baik anggota eksekutif maupun legislatif sebanyak 11 kali http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf. selain pemilu di ranah nasional, pemilu juga di lakukan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan umum yang ada di daerah biasanya memilih kepala daerah baik bupati serta wakil bupati ataupun walikota serta wakil walikota.

Demi terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia maka dalam hal peserta pemilu calon yang akan di usung sebagai peserta nantinya bisa dari independen (mandiri) maupun dari usulan partai politik. Biasanya partai politik lah yang mempunyai kekuatan terbesar dalam pengusungan calon dalam pemilihan umum. Partai politik mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara demokrasi, utamanya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang

di maksud seperti yang telah tertuang dalam Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 ayat 4 pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai politik termasuk indikator terpenting dalam demokrasi, bahkan partai politik juga bisa menentukan suatu demokrasi. Partai politik memiliki peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Peran penghubung yang di maksud adalah partai politik sebagai perantara dapat menjelaskan yang diinginkan warga Negara kepada pemerintah dan menyampaikan kebijakan yang dibuat Negara (pemerintah) kepada warga Negara. Suatu Negara tetap harus membuktikan praktik ketatanegaraannya dengan demikian persyaratan Negara demokrasi tidak hanya bersifat formal namun juga nyata dan terbukti. Pemilihan umum pertama kali dilakukan pada masa orde lama tahun 1955 yang pada saat itu di hasilkan artai besar secara berurut-urut yaitu partai nasional Indoesia (22,3%), masyumi (20,90%), nahdatul ulama (18,4%) dan partai komunis Indonesia (15,4%). Kemudian pada masa orde baru pada tahun 1971 pemilu di ikuti oleh 10 peserta partai politik dan selebihnya penyelenggaraan pemilu secara berturut-turut pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang di ikuti oleh 3 peserta partai politik. Setelah runtuhnya rezim orde baru yang pada saat itu kepemerintahan di pimpin oleh B.J Habibi pemilu pada rezim reformasi dilakukan pertama kali pada tahun 1999 yang di ikuti oleh 48 peserta partai

politik dan suara terbanyak diperoleh partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

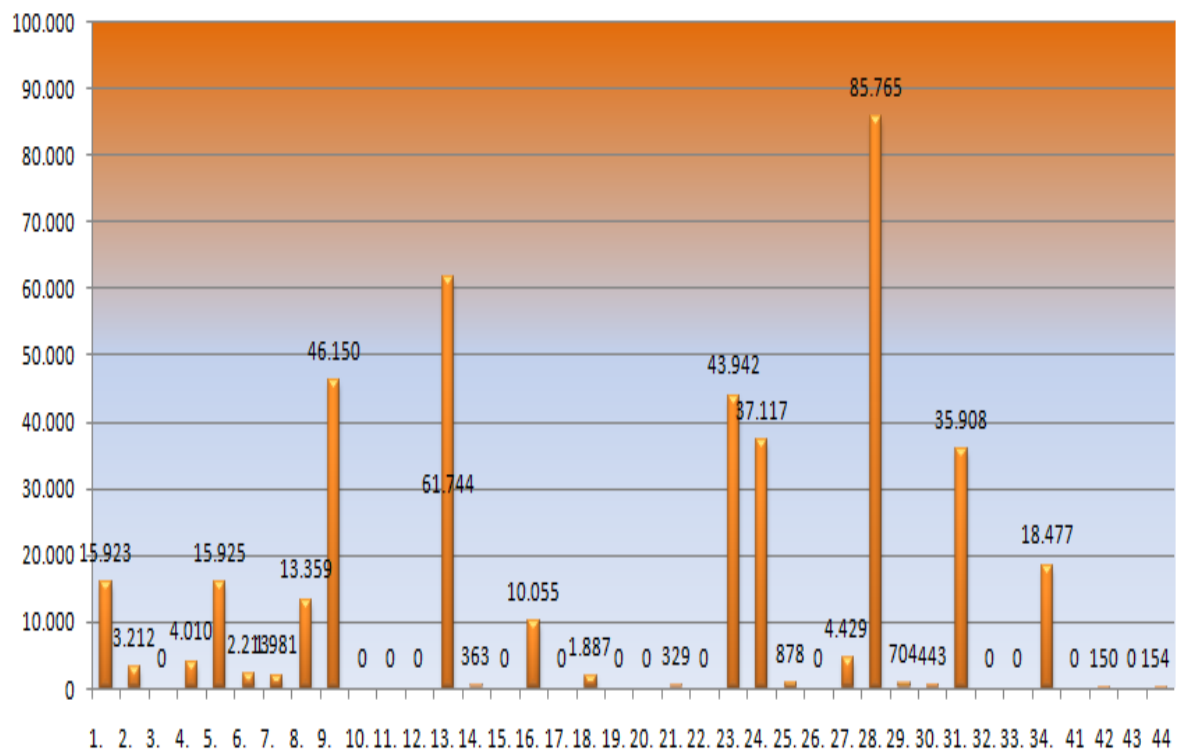
Pemilu yang dilaksanakan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 diikuti oleh banyak peserta partai politik. Ini berimplikasi pada ketatnya persaingan antar peserta dalam meraih perolehan suara dari masyarakat. Segala strategi, taktik dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu ini yang pada saat itu diikuti oleh 15 peserta partai politik.

Partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik yang berkiprah cukup lama dan diakui eksistensinya di negara Indonesia. Dua kali pemilu yang diselenggarakan pasca orde baru yaitu pada tahun 1999 dan 2004 menunjukkan jika PDIP memiliki basis kekuatan masa yang besar, selain itu mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan strategi politik kepada simpatisan yang nantinya di aplikasikan kepada masyarakat untuk bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. Pendukung partai berlambang banteng ini terkenal dengan loyalitasnya yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia.

Hal ini juga terlihat di lingkup daerah Jawa Tengah khususnya di kabupaten Wonosobo. Terbukti setelah berlangsungnya pemilihan umum baik untuk memilih anggota eksekutif ataupun legislatif suara partai demokrasi Indonesia perjuangan hampir dipastikan selalu unggul dibandingkan partai lawannya di kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan berbagai cara strategi partai dan caleg PDI-Perjuangan menyampaikan program-program

kerja kepada sasarannya yaitu masyarakat, dengan berkampanye salah satu strategi partai untuk menarik masa dan simpatisan, melalui media masa serta turun langsung merupakan strategi komunikasi yang sering dilakukan baik partai maupun caleg yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tersebut. Dominasi dan strategi yang di terapkan oleh partai PDIP ini cukup berjalan efektif jika dilihat dari dominasi politiknya di kabupaten Wonosobo.

TABEL 1.1
DATA PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2009 KABUPATEN WONOSOBO



Keterangan nomor dan nama parpol

1	HANURA	11	PK	21	REPUBLIKAN	31	DEMOKRAT
2	PKPB	12	PPD	22	PELOPOR	32	PKDI
3	PPPI	13	PKB	23	GOLKAR	33	PIS
4	PPRN	14	PPI	24	PPP	34	PKNU
5	GERINDRA	15	PNI-M	25	PDS	41	MERDEKA
6	BARNAS	16	PDP	26	PNBK	42	PPNUI
7	PKPI	17	PAKARPANGAN	27	PBB	43	PSI
8	PKS	18	PMB	28	PDI-P	44	BURUH
9	PAN	19	PPDI	29	PBR		
10	PIB	20	PDK	30	PATRI		

Sumber data: komisi pemilihan umum kabupaten Wonosobo

TABEL 1.2

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARAPILGUB JATENG
TAHUN 2013 KABUPATEN WONOSOBO**

N O	KECAMATA N	PROLEHAN SUARA					
		Drs. H. HADI PRABOW O, MM	%	H. BIBIT WALUYO	%	GANJAR PRANOWO , SH	%
		dan		dan		dan	
		Dr. H. DON MURDON O, SH, M.Si	Prof. Dr. SUDIJONO SASTROAT MODJO, M.Si	Drs. H. HERU SUDJATM OKO, M.Si			
1.	WADASLINT ANG	7.145	32,71 %	5.874	26,89 %	8.824	40,40 %
2.	KEPIL	7.118	27,75 %	9.007	35,12 %	9.522	37,13 %
3.	SAPURAN	6.228	27,95 %	8.753	39,29 %	7.299	32,76 %
4.	KALIWIRO	6.149	27,62 %	5.642	25,35 %	10.468	47,03 %
5.	LEKSONO	5.366	27,39 %	5.186	26,47 %	9.040	46,14 %

6.	SELOMERTO	6.107	28,21 %	7.270	33,58 %	8.271	38,21 %
7.	KALIKAJAR	10.870	37,14 %	7.877	26,91 %	10.521	35,95 %
8.	KERTEK	9.492	24,55 %	12.081	31,25 %	17.088	44,20 %
9.	WONOSOBO	7.985	22,52 %	10.922	30,81 %	16.548	46,67 %
10	WATUMALANG	7.624	29,03 %	9.456	36,01 %	9.181	34,96 %
11	MOJOTENGAH	8.449	32,98 %	7.382	28,82 %	9.787	38,20 %
12	GARUNG	7.247	34,18 %	7.064	33,31 %	6.894	32,51 %
13	KEJAJAR	8.150	47,49 %	4.645	27,06 %	4.368	25,45 %
14	SUKOHARJO	4.514	25,67 %	5.440	30,93 %	7.632	43,40 %
15	KALIBAWANG	3.483	29,51 %	3.188	27,01 %	5.131	43,48 %
	Jumlah	105.927	29,73 %	109.787	30,81 %	140.574	39,46 %

Sumber data: komisi pemilihan umum kabupaten Wonosobo

Berdasarkan ke dua tabel diatas bisa kita lihat dominasi kekuatan partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) di pemilu yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Pada tabel 1 bisa kita lihat kekuatan partai demokrasi Indonesia perjuangan di tingkat lokal yang pada saat itu diselenggarakan pemilihan umum legislatif (DPRD) di daerah pemilihan kabupaten Wonosobo dengan jumlah pemilih sebanyak 603.549 orang. PDIP yang pada saat itu berada di nomor urut 28 meraih suara tertinggi dengan perolehan 85.765 suara dan mendapatkan jatah kursi di legislatif sebanyak 11 kursi. Sedangkan pada tabel 2 bisa kita lihat pada saat itu diadakannya pemilihan umum kepala daerah Jawa Tengah yang di ikuti oleh 3 calon peserta, dimana kemenangan diperoleh oleh pasangan nomor urut 3 yaitu

Ganjar Pranowo S.H dan Drs H.Heru Sudjatmoko M.Si dengan perolehan suara sebanyak 140.574 suara di kabupaten Wonosobo. Dimana salah satu partai pendukung pasangan nomor urut 3 ini adalah partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

TABEL 1.3
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM DPRD KAB/KOTA WONOSOBO TAHUN 2014

NO	PARPOL	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	TOTAL SUARA PARTAI
1	NASDEM	7.160	1.617	4.195	5.688	10.163	6.619	35.442
2	PKB	12.480	10.815	13.479	26.278	16.077	10.579	89.708
3	PKS	7.912	1.583	2.014	3.037	4.040	970	19.556
4	PDIP	17.568	13.831	15.360	11.375	22.697	8.725	89.556
5	GOLKAR	7.191	11.507	4.542	4.740	3.488	8.555	40.023
6	GERINDRA	4.835	5.540	12.807	7.806	6.122	2.914	40.023
7	DEMOKRAT	5.255	5.053	3.122	6.445	3.825	8.492	32.192
8	PAN	5.520	3.962	7.568	5.012	4.048	8.082	34.192
9	PPP	3.805	11.205	2.310	8.480	7.499	6.127	39.426
10	HANURA	2.928	5.304	4.990	10.597	7.115	5.322	36.256
11								
12								
13								
14	PBB	355	296	103	265	289	207	1.515
15	PKPI	130	146	145	340	269	85	1.115
TOTAL SUARA SAH		75.139	70.859	70.635	90.063	85.632	66.677	

Sumber data: komisi pemilihan umum kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel diatas adalah pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam pemilihan wakil dewan DPRD kab/kota Wonosobo bisa kita lihat hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten Wonosobo PKB berada berada di urutan teratas dengan perolehan suara 89.708 suara

(19,39%). Hasil tersebut unggul tipis dari suara PDIP dengan perolehan suara 89.556 suara (19,35%). Diposisi ketiga diduduki oleh partai Golkar dengan perolehan suara 40.023 suara (8,65%) dan di posisi ke empat oleh PPP 39.426 suara (8,52%). Meski PKB unggul jumlah suara dari PDIP namun perolehan kursi PDIP lebih banyak. Dari 6 Daerah pemilihan yang terdiri dari 15 kecamatan, PDIP berhasil unggul di 4 daerah pemilihan yaitu dapil I, II, III dan V. Berdasarkan perolehan suara di daerah pemilihan (DAPIL) PDIP berhasil meraih 9 kursi, dan PKB meraih 8 kursi. Selisih kursi ini karena dipengaruhi persebaran suara PKB tidak merata di semua dapil sedangkan perolehan suara PDIP cukup merata. (KR Jogja di akses tanggal 5 November 2015 pukul 19:29 WIB)

Dalam memenangkan pemilu tidak terlepas dari strategi politik yang dimiliki oleh partai. Hal ini disebabkan karena untuk memenangkan suatu kontestasi politik, partai membutuhkan strategi politik yang baik. Keberhasilan PDIP dalam memenangi pemilu yang diselenggarakan khususnya di kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari strategi yang dibuat oleh partai tersebut. Strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam upaya memenangkan pemilu dilakukan baik secara kelembagaan, yaitu strategi partai dalam memenangkan pemilu maupun strategi strategi yang dilakukan secara personal oleh para calon anggota legislatifnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**STRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014. (Studi Kasus DPC Kabupaten Wonosobo)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 di daerah kabupaten Wonosobo?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 dikabupaten Wonosobo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui strategi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Wonosobo.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Wonosobo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kajian tentang partai politik di Indonesia.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian tentang partai politik selanjutnya di masa yang akan datang.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Menurut Koentjoroningrat (1997:9) kerangka teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

1. Teori Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Setelah perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden dan kepala daerah di pilih melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum sudah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan secara berkala di republik Indonesia.

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul *reformasi pemilu*, mendefinisikan pemilu adalah instrument yang mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (2009:6).

Definisi pemilihan umum diatas menjelaskan bahwa pemilu merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk

pemerintahan yang sah, serta sebagai sarana menjelaskan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia turut serta mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Waki-wakil rakyat diwakilkan atau dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan hak aspirasi dari rakyat.

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut tentang pemilu dalam bukunya yang berjudul *mahkamah konstitusi pengawal demokrasi*, bahwa yang dimaksud pemilihan umum adalah sebagai berikut:

“pemilihan umum adalah syarat minimal dari adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1).

Dari definisi menurut Soedarsono di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal dari adanya demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat, wakil kepala daerah, dan presiden. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden. Anggota legislatif, presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung sehingga semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Rakyat harus menentukan dan memilih sendiri wakil-wakil rakyat tersebut, karena begitu pentingnya posisi wakil-wakil rakyat tersebut dalam siklus ketatanegaraan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat bersama.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan pemilu secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab antara lain:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang cenderung juga berubah.
3. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalm eksekutif maupun legislatif.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan masyarakat yang juga cenderung berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilu menjadi sarana menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Di Indonesia sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional sebagai aspek reformasi politik menuju demokrasi, didasarkan kepada peluang yang di berikannya untuk menghilangkan kelemahan sistem pemilu proporsional, baik dampak secara langsung

maupun tidak langsung. Menurut Arbi Sanit (1998:93), meskipun penggunaan sistem distrik merupakan reformasi mendasar, akan tetapi itulah cara untuk menghilangkan penyalahgunaan sistem pemilu proporsional yang bersifat mendasar, sehingga hakekat sistem itu hilang dalam prakteknya, sebagaimana dibuktikan oleh mandulnya sistem pemerintahan perwakilan yang otoritarian dan demokrasi formalitas. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil (luber jurdil) seperti yang dijelaskan dalam UU No 8 tahun 2012 adalah:

a) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga negara yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak untuk dipilih. Pemilihan bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi apapun.

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada saat pemilu dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama , serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Di dalam pemilihan umum tentu terdapat sistem yang mengatur di dalamnya. Sistem pemilihan itu sendiri adalah merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Demokrasi itu ditandai dengan 3 (tiga) syarat yakni: adanya kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum dengan sistem kompetisi, partisipasi dan jaminan hak-hak sipil dan politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat. Menurut Jimli Asshiddiqie (2006:182) sistem pemilu dibagi menjadi dua yaitu: sitem pemilu perwakilan distrik/mayoritas (*singel member constituency*) dan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*).

a. Sistem perwakilan distrik

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:182) Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan letak geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan distrik akan diberikan satu jatuh kursi di parlemen. Negara dibagi ke dalam wilayah atau distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak

yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain. Sistem pemilihan seperti ini dipakai di negara Inggris, Amerika, Kanada, dan India. Ada dua perbedaan sistem distrik dengan sistem lainnya yaitu.

Pertama, didalam sistem distrik pemilih dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan, biasanya distrik ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administratif. Distrik pemilihan merupakan sebuah wilayah yang garis-garis perbatasannya di tarik sedemikian rupa sehingga sesuai dengan syarat-syarat pemilu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa jumlah pemilih yang mendiami suatu distrik kira-kira sebanding dengan jumlah pemilih di distrik lainnya.

Kedua adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan di dalam sistem distrik bukanlah organisasi politik melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh organisasi di suatu distrik. Yang boleh dicalonkan oleh partai-partai di suatu distrik adalah para politisi yang berdomisili di distrik tersebut. Dengan demikian sistem distrik mensyaratkan adanya keadaan yang relatif saling kenal antara rakyat dan calon wakil yang akan dipilih rakyat.

TABEL 1.4
Perbandingan keunggulan dan kelemahan sistem distrik

NO	KEUNGGULAN	KELEMAHAN
1	Lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu kursi.	Kurang memperhatikan partai kecil dan golongan minoritas.
2	Penyederhanaan partai tanpa adanya keterpaksaan. Contohnya dwi partai di Amerika Serikat.	Kurang representatif karena partai yang calonnya kalah dalam satu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya.
3	Wakil dari setiap distrik cenderung lebih akrab dan mengenal keadaan sosial di distriknya.	Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.
4	Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.	

Dampak dari sistem distrik ini adalah bahwa dari salah satu partai dapat memperoleh kursi yang lebih besar dalam dewan perwakilan daripada proporsi jumlah suara yang diperoleh. Fenomena ini disebut *over representation*. Sebaliknya partai yang memperoleh kursi lebih sedikit padahal perolehan suara mendapatkan yang terbanyak ini disebut *under representation*.

b. Sistem perwakilan berimbang

Dalam sistem ini presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap parpol. Jimly Asshiddiqie

(2006:183) mencontohkan model dari sistem ini. Misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang, sedangkan jumlah kursi kursi diperwakilan rakyat 100 kursi maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa besar suara yang diperoleh setiap parpol.

Sistem proporsional ada dua macam yaitu sistem daftar tertutup dan sistem daftar terbuka. Dalam sistem daftar tertutup para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan sistem daftar terbuka selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat calon yang diusung oleh parpol tersebut.

TABEL 1.5

Kelemahan dan kelebihan sistem berimbang (proporsional)

NO	KELEMAHAN	KEUNTUNGAN
1	Kurang mendorong partai untuk berintegrasi sehingga berakibat kepada bertambahnya jumlah partai.	Sistem proporsional dianggap lebih representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh saat pemilu.
2	Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.	Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi. (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang)
3	Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk memperoleh suara	

mayoritas (50%) lebih.	
------------------------	--

Dalam pemilu legislatif 2014 sistem pemilu yang dianut adalah sistem pemilu proporsional dengan varian daftar terbuka, dimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

2. Teori Partai Politik

Menurut pasal 1 no. 2 tahun 2011 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan dan kesatuan republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan definisi partai politik menurut para tokoh adalah sebagai berikut:

Menurut Mark Hagopian dalam bukunya yang berjudul *regimes, movement, and ideologies* (1978) bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologi melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Menurut Raymond G. Gettel (1987) partai politik adalah terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Loen D. Epstein dalam bukunya yang berjudul *political parties in western democracies* partai politik adalah satu kelompok pengejar kedudukan pemerintah, yang bersama-sama terikat pada satu identitas. Satu identitas, nama ataupun label politik paling tidak bisa menunjukkan karakteristik partai politik itu sendiri, baik yang menyangkut besarnya, tingkat integritasnya ataupun jumlah pendukungnya.

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Miriam Budiarjo (2008:404).

Dari pengertian tentang partai politik menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai suatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik bukanlah suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai

politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan politik.

1) Fungsi Partai Politik

Sebagai wadah yang sangat kental dengan nuansa politik, tentunya partai politik mempunyai segudang tugas sekaligus fungsi sebagai konsekuensi dari keberadaannya di masyarakat.

Secara umum fungsi partai politik antara lain sebagai berikut:

a. Representasi (perwakilan)

Kegiatan representasi dimaksudkan sebagai upaya mengartikulasikan kepentingan didalam dan melalui partai. Fungsi ini juga berwujud sebagai perantara yang merupakan ekspresi kepentingan kelompok yang diwakilinya sehingga dapat diterima semua anggota.

b. Konversi dan agresi

Proses konversi menyangkut proses transformasi dari kepentingan dan tuntutan untuk menjadi kebijaksanaan dan keputusan.

c. Integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi)

Sosialisasi menyangkut proses pemindahan norma-norma sistem politik kepada masyarakat, mobilisasi merupakan variasi ekstrem dari sosialisasi berupa menanamkan kepentingan kepada sejumlah orang untuk menjamin

terciptanya dukungan masa kepada partai politik maupun sistem politik secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi merupakan hasil dari sosialisasi dan mobilisasi. Masa diarahkan kepada keyakinan bahwa partai merupakan media ekspresi kepentingan dan proses partisipasi dalam penentuan kebijakan terbuka bagi semua pihak sehingga mampu mengintegrasikan individu ke dalam sistem politik.

d. Rekrutmen

Merupakan kegiatan partai yang berkaitan dengan persiapan untuk mencari dan melatih pemimpin dalam pemilihan untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan.

e. Pertimbangan

Perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Partai politik memungkinkan terciptanya suasana perdebatan dengan tujuan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah lewat diskusi dan kompetisi antara pendapat-pendapat yang ada sehingga apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, parpol akan menuntut proses pertimbangan kembali yang lebih terbuka untuk semua pihak.

f. Sarana untuk mengatur konflik

Tugas lain dari partai politik adalah membantu merumuskan akar-akar pertikaian dan berusaha mengatasi konflik tersebut dengan mencari jalan keluar dari pendapat dan kepentingan yang berbeda.

2) Tugas-Tugas Partai Politik

Adapun tugas-tugas partai politik sebagai berikut:

- a. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Parpol bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat kemudian langkah selanjutnya adalah memilih, merumuskan, serta menyerahkannya kepada pemerintha untuk dapat di jadikan kebijakan politik yang diperjuangkan semaksimal mungkin.
- b. Partai politik mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.
- c. Partai politik mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial serta memupuk dan menumbuhkan kesadaran akan loyalitas nasional.
- d. Partai politik juga bertugas untuk mengatur pertikaian dan membatu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya. Soelistyati Ismail Gani (1987:113)

3) Tipologi Partai Politik

Ada banyak definisi dan tipologi partai politik yang sering kita dengar seperti otoriter dan demokrasi, integrative dan representative, ideologis dan pragmatis, agamis dan sekuler dll. Tentunya pembentukan tipologi partai ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan pembahasan fungsional tentang suatu parpol dengan mempelajari karakteristik utamanya. Tipologi kepartaian berdasarkan pada:

a. Sumber dukungan partai

Berdasarkan pemahaman ini partai dibedakan menjadi komprehensif dan sectarian. Dikatakan komprehensif jika partai berusaha untuk mendapatkan suara dari warga negara, sedangkan sectarian adalah parpol yang menggunakan suatu kelas seperti agama, daerah ideologi sebagai nilai jual partai politik untuk memperoleh dukungan.

b. Organisasi internal

Tipe yang dimaksud adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup memiliki keanggotaan yang terbatas atau mengenakan aturan persyaratan yang ketat kepada anggotanya. Sedangkan partai terbuka adalah yang memperbolehkan semua orang menjadi anggotanya. Partai yang tertutup sering dikaitkan dengan otoriter dan

cenderung mengenakan aksi yang langsung diarahkan pada *control monopolistic* pemerintah, sedangkan partai terbuka lebih menekankan pada aksi politik dan menghormati aksi pluralisme.

c. Cara bertindak dan berfungsi

Pembedaan partai pada frase ini terbagi menjadi menyebar dan memusat. Partai yang menyebar cenderung menekankan integrasi, pengawasan permanen, mobilisasi dan pembangunan institusi. Sedangkan partai yang memusat menekankan pada perwakilan, agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan. Partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud dan periode tertentu.

4) Hukum Besi Oligarki

Menurut Ichlasul Amal (2012:43) dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* menjelaskan bahwa partai yang dipandang sebagai suatu entitas dan mekanisme tidak selalu dapat teridentifikasi dengan totalitas anggotanya, apalagi dengan kelas yang memiliki partai itu. Partai dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena telah menjadi tujuan itu sendiri, dengan target dan kepentingan sendiri maka dari sudut pandang teologis partai terpisah dari kelas yang diwakilinya. Dalam suatu partai tidaklah jelas apakah kepentingan massa yang bergabung akan selaras dengan kepentingan-kepentingan birokrasi yang

menjaga personifikasi partai tersebut. Strata sosial akan cenderung menjadi terisolir, menciptakan kelompok-kelompok untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Dalam jangka panjang hal ini akan cenderung mengalami transformasi menjadi kelas-kelas terpisah dan tahap selanjutnya akan berubah menjadi kelas-kelas yang berbeda.

Proses yang berawal dari konsekuensi perbedaan fungsi-fungsi dalam partai berujung dengan kualitas pemimpin yang diperoleh dari massa dalam kelas berbeda yang paling dominan. Dengan demikian oligarki berasal dari transformasi psikis yang dialami oleh pemimpin partai. Namun lebih dari itu oligarki bergantung pada apa yang dapat dikatakan sebagai psikologi organisasi itu sendiri. Yakni kepada kebutuhan-kebutuhan taktis dan teknis yang berasal dari konsolidasi dari setiap kesatuan politik.

3. Teori Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai politik ialah proses pematangan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Membuat lembaga-lembaga politik menjadi efektif bukan hanya meliputi penguatan dari segi kapasitas dan sumber dayanya tetapi juga merancangnyanya agar cocok dengan situasi. Hal ini merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks dan kontroversial berkenaan dengan

aturan–aturan elektoral dan konstitusional yang membentuk perwakilan dan pemerintahan.

Setiap organisasi yang normal, tumbuh dan berkembang secara alamiah menuruttahapan waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide–ide dan nilai–nilai yang dianut di dalam organisasai tersebut semakin terlembagakan *institutionalized* dan menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang semakin melembaga cenderung pula mengalami proses ‘depersonalisasi’. Orang dalam maupun orang luarsama–sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai sebuah institusi dan tidak mencampur-adukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurus partai politik tersebut.

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand dalam *Party Politics* (2002) Pelembagaan partai politik dapat diukur dengan melakukan penaksiran *assessment* terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka pelembagaan politik dapat diukur melalui empat hal, yaitu :

- a) Derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
- b) Derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.

- c) Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan *decisional autonomy* sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.
- d) Derajat pengetahuan atau citra publik reification terhadap suatu partaipolitik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Menurut teori di atas, organisasi dengan kelembagaan yang kuat biasanya memiliki lebih banyak sistem ketahanan terhadap ancaman dari lingkungannya. Sebab, instrumen-instrumen kontrol organisasi terhadap ketidakpastian lingkungan terkonsentrasi pada kekuasaan pusat dan bukan tersebar di antara sub-kelompok organisasi. Tetapi, lembaga yang kuat bisa menjadi lebih rentan terhadap suatu krisis dibanding lembaga yang lemah. Karena bila tingkat kesistemannya tinggi maka krisis yang menimpa salah satu bagian dapat dipastikan akan berdampak pula terhadap bagian-bagian lainnya. Sebaliknya, apabila tingkat kesistemannya rendah, kemandirian relatif terjadi di antara bagian-bagian organisasi tersebut. Sehingga memungkinkan terjadinya proses pengisolasian terhadap dampak krisis yang terjadi.

4. Teori Strategi Politik

Banyak definisi-definisi strategi yang telah dikemukakan oleh para ahli yang telah dituangkan pada karya mereka masing-masing. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratos* yang berarti

tentara dan *ego* berarti pemimpin. Suatu strategi mempunyai skema dasar untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi. Disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan Quinn (1999:10) mendefinisikan strategi sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kegiatan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan organisasi, antisipasi perubahan dalam lingkungan serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata rival organisasi lain.

Berdasarkan ke dua teori para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan terhadap rival organisasi lain.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner seperti yang dikutip oleh Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat di pandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi itu melakukannya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu organisasi harus secara intens berinteraksi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut akan dilaksanakan sehingga hubungan antara keduanya searah dan melihat kemampuan eksternal dan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi tersebut.

a. Strategi Politik

Pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kandidat dan tim pemenangnya untuk dapat memenangkan pemilu. Para kandidat perlu melakukan kajian untuk mendeteksi seberapa besar *size* pendukungnya, masa mengambang dan pendukung kandidat rival. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada

saat pemilihan dan juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih.

Sementara itu cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan. Di satu sisi terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam memilih kandidat. Konstituen, non partisan dan pendukung pesaing membutuhkan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan partai politik atau kandidat. Konstituen memiliki loyalitas yang tinggi dibandingkan dengan pemilih yang lainnya. Sementara masa non partisan adalah masa mengambang yang masih belum memiliki kandidat yang akan di dukung. Sedangkan pemilih pendukung lain adalah jenis pemilih yang terakhir dimana para kandidat harus mengembangkan hubungan dengan pendukung kandidat lain. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan situasi yang aman selama masa kampanye. Selain itu kesan positif perlu dimunculkan pada pendukung lain sehingga tidak menutup kemungkinan pendukung kandidat lain akan beralih memberikan dukungannya kepada kandidat tersebut.

Strategi penguatan sangat dibutuhkan untuk pemilih konstituen. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap terjaga.

Strategi menanamkan keyakinan perlu dilakukan kepada pemilih non partisipan, kepada jenis pemilih ini perlu diyakinkan secara *problem solving* ataupun ideologis. Sedangkan strategi yang perlu diterapkan kepada pemilih kandidat lain adalah secara pengenalan dan merebut simpati dari pendukung kandidat lain. Karena masing-masing kandidat berkepentingan untuk memperbesar porsi dukungan mereka termasuk menggaet dukungan dari pendukung kandidat lain.

b. Komunikasi Politik

Membangun suatu *image* politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Menurut Hafied Cangara (2009:36) komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap politik. Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan kandidat untuk menstabilkan dan menerima umpan balik tentang isu-isu politik yang berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat.

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai *diadic* yaitu komunikasi dua arah. Barry & Carnt (1997:45). Dua arah yang berarti komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh kandidat kepada masyarakat, tetapi juga dari masyarakat kepada kandidat tersebut. dalam Hal ini, kandidat dan tim pemenangnya bertugas merangkum dan menganalisis pesan-pesan tersembunyi dibalik

peristiwa yang terjadi. Karena tidak semua masyarakat mampu atau memiliki kapasitas untuk merumuskan permasalahan apa yang terjadi kepada mereka. Umpan balik yang masyarakat berikan lebih sering banyak terjadi tersirat dibandingkan tersurat.

c. Pemasaran Politik

Pemasaran politik menurut Firmanzah (2012:128) adalah penerapan ilmu *marketing* dalam kehidupan politik. Dalam pemasaran politik yang di tekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode *marketing* dalam penyusunan produk politik, distribusi produk politik kepada publik serta meyakinkan bahwa produk politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, sehingga membantu politikus dan partai politik untuk membangun hubungan dua arah dengan masyarakat.

Dalam penerapannya pemasaran politik telah menjadi satu fenomena. Tidak hanya dalam ilmu politik, tetapi juga memunculkan ragam pertanyaan para *marketer* politik yang mungkin selama ini terbiasa dengan konteks dunia usaha. Tentunya terdapat beberapa asumsi yang mesti dilihat dalam memahami pemasaran politik, karena konteks dunia politik memang mengandung banyak perbedaan dengan dunia usaha. Jadi isu politik bukan sekedar produk yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula keterikatan simbol dan nilai yang menghubungkan individu-individu. Dalam hal ini politik lebih

dilihat dari segi aktivitas sosial untuk menegaskan identitas masyarakat.

Adman Nursal (2008:242) membuat tiga tahapan dalam strategi pemasaran yaitu segmentasi, *targeting* dan *positioning*. Tahapan-tahapan ini dijalankan untuk mengidentifikasi khalayak pemilih yang berpotensi menjadi lumbung suara. Adanya penjelasannya sebagai berikut:

1) Segmentasi

Adalah upaya untuk mengenali karakteristik tiap kelompok masyarakat, meskipun nantinya tidak secara keseluruhan kelompok tersebut diidentifikasi. Segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih dekat kelompok-kelompok sasaran guna mencari peluang.

2) Targeting

Adalah memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan di jadikan peluang untuk mencapai sasaran. Sebelum melakukan kampanye terlebih dahulu dimulai dengan memahami wilayah pemilihan. Tim kampanye dan tim sukses partai harus dapat melihat total keseluruhan pemilih diwilayah tersebut. Dan dari sini akan ditetapkan target jumlah pemilih yang harus diraih agar dapat memenangkan pemilu.

3) Positioning

Adalah tindakan untuk membangun citra tertentu kedalam benak para pemilih agar tawaran produk politik dari suatu kandidat memiliki ciri khas, jelas dan *meaningful*. Positioning yang efektif akan membuat perbedaan dan keunggulan seorang kandidat dibandingkan kandidat pesaingnya.

Adman Nursal juga mengategorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh kandidat calon dan tim pemenangannya untuk mencari dan mengembangkan masa pendukung selama masa proses kampanye politik yaitu:

1) Push marketing

Menurut Nursal push marketing adalah bagaimana menyampaikan produk politik langsung kepada para pemilih. Dalam pendekatan ini kandidat berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulasi yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan memilih salah satu kandidat. Disamping itu kandidat perlu menyediakan sejumlah alasan rasional maupun emosional kepada para pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak dan memberikan dukungan. Tanpa alasan-alasan ini pemilih akan merasa ogah-ogahan karena mereka tidak punya cukup alasan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun pada dasarnya push marketing adalah usaha agar produk

politik mereka dapat menyentuh para pemilih secara langsung dengan cara yang lebih personal.

2) Pass marketing

Strategi ini menggunakan individu-individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih (*influencer*). Sukses atau tidak penggalangan masa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para *influencer* ini. Semakin tepat *influencer* yang terpilih, efek yang diraih pun akan menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan pikiran publik.

3) Pull marketing

Menurut Nursal pull marketing adalah bagaimana penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media masa. Strategi seperti ini menitikberatkan pada pembentukan *image* politik yang positif. Robiniwitz dan Machdonald (1989) menganjurkan bahwa supaya simbol dan *image* politik dapat memiliki dampak yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Sehingga masyarakat akan memiliki rasa simpati terhadap calon kandidat yang akan dipilihnya.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar

tidak terjadi kesalah pahaman. Di gunakannya konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak kita teliti. Menurut Masri Singarimbun (1992:34) konsep ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

1. Pemilihan umum adalah syarat minimal dari adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.
2. Pelembagaan Politik adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.
3. Sistem pemilu merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi, dimana dalam demokrasi 3 syarat yaitu: adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.
4. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan dan kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
5. Strategi politik adalah langkah-langkah taktik yang dilakukan oleh kandidat maupun partai politik dengan mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut persaingan memperoleh suara terbanyak serta mendapatkan kemenangan pada pemilihan umum.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian dalam taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitiannya meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya merupakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu aspek fenomenan sosial tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Sutrisno Hadi (1986:7). Penelitian deskriptif berupa menjabarkan atau analisis maka sifat penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan obyek dan di dalamnya terdapat upaya deskriptif , pencatatan dan analisis.

2. Lokasi Dan Informan Penelitian

Lokasi penelitian berada di kabupaten Wonosobo dengan lebih terperinci lagi yaitu di DPC partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dengan melibatkan beberapa narasumber dari pengurus partai PDIP yang nantinya akan memberikan data seputar penelitian dan juga akan melibatkan tim sukses partai untuk memperkuat hasil penelitian. Penentuan informan di tentukan dengan teknik *snowball* dimana informan dimulai dari satu orang kemudian menjadi banyak yang

menggunakan orang kunci (*key person*). Orang kunci adalah informan yang dianggap dapat memberikan keterangan terhadap data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu pengurus DPC partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dan tim sukses pemenangan partai. Data primer akan diperoleh melalui observasi langsung, wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan sumber data yang lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari DPC parta demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), instansi-instansi lain yang terkait, dan kepustakaan lain yang terkait seperti buku, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan adalah dengan observasi pengamatan wawancara yang mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai konsep penelitian terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Wawancara akan dilakukan di DPC partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Dokumentasi biasanya dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi, dokumen ini digunakan sebagai sumber yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsir bahkan meramalkan. Adapun dokumen pribadi terdiri atas catatan tim sukses, pengurus partai dan untuk dokumen resmi terdiri dari aturan atau memo yang dikeluarkan oleh DPC PDIP kabupaten Wonosobo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian besar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif, adapun gambaran mengenai data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Seperti yang telah dijelaskan diatas teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini dianggap yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

b) Reduksi data

Reduksi data akan dilakukan dengan cara membuat abstraksi data. Jadi setelah membaca, mempelajari dan menelaah data, penyusun akan merangkum data inti dengan tetap menjaga validitas dan obyektivitas data.

c) Interpretasi data

Tahap ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tahapan kedua. Dalam tahap ini membutuhkan kecermatan dan konsentrasi sehingga dapat menghasilkan interpretasi data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

d) Penarikan kesimpulan dan generalisasi data

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selama proses verifikasi dilakukan, peneliti sebaiknya tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang mempunyai sifat orisinalitas. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih dapat diterima akal. Temuan penelitian dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

H. RANCANGAN BAB

BAB I : berisi tentang latar belakang masalah yang akan dibahas oleh peneliti, rumusan masalah yang akan di pecahkan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang akan di pakai dan juga metode yang dipakai oleh peneliti.

- BAB II : berisi tentang deskripsi wilayah penelitian dan profil lembaga partai politik yang akan dijadikan objek penelitian.
- BAB III : berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.
- BAB IV : merupakan penutup dan berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian.